



**PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026**



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-9
1.3. Maksud dan Tujuan	I-11
1.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-45
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKBPPPA	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-6
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V : PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Kalender Penyusunan Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2026	I-3
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA Tahun 2024 s/d Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota	II-10
Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-17
Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-46
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan tahun 2025 – 2029	III-4
Tabel 3.2 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-6
Tabel 3.3 : Program dan Kegiatan yang ada pada setiap PD	III-13
Tabel 3.4 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III-12
Tabel 3.5 : Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-16
Tabel 3.6 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPPKBPPPA Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota	III-18
Tabel 4.1 : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-2
Tabel 4.2 : Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-37



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004	I-9





BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja PD di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Renja PD dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan rencana strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Renja PD disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 - f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

- t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
- y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja PD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Penetapan Perubahan Renja PD tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja tahun 2026 harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis DPPKBPPPA.

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut:

- (i) Persiapan Penyusunan;
- (ii) Penyusunan Rancangan awal;
- (iii) Penyusunan Rancangan;
- (iv) Pelaksanaan Forum PD/lintas PD;
- (v) Perumusan Rancangan akhir dan
- (vi) Penetapan Renja PD.

RKPD Tahun 2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana program-program yang telah ditetapkan akan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 diharapkan dapat memenuhi target RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja DPPKBPPPA merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima



Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Tahapan dan jadwal penyusunan Renja DPPKBPPPA Tahun 2026 sebagaimana Tabel 1.1 berikut ini :



Tabel 1.1
Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2026

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																																
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
A.	Persiapan Penyusunan Renja 2026																																									
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																									
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																									
3	Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah																																									
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																									
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026																																									
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra DPPKBPPPA																																									
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja DPPKBPPPA kepada Bappelitbangda untuk Diverifikasi																																									
3	Verifikasi Ranwal Renja DPPKBPPPA oleh Bappelitbangda untuk																																									



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja DPPKBPPPA Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra DPPKBPPPA																																								
C.	Penyusunan Rancangan Renja 2026																																								
1	Penyusunan Rancangan Renja DPPKBPPPA sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																								
2	Penyampaian Rancangan Renja DPPKPPA kepada Bappelitbangda untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																								
3	Verifikasi Renja DPPKBPPPA oleh Bappelitbangda untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																								
D.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																								
1	Pelaksanaan Forum DPPKBPPPA yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPPKBPPPA Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka																																								



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																																	
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
	Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja DPPKBPPPA																																										
E.	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2026																																										
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																										
2	Penyampaian Rancangan Akhir Renja DPPKBPPPA kepada Bappelitbangda untuk Diverifikasi																																										
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPPKBPPPA oleh Bappelitbangda untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja DPPKBPPPA Sudah Selaras dengan Perbup RKPD																																										
F.	Penetapan Renja PD 2026																																										
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja DPPKBPPPA																																										



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																								
2	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bappelitbangda																																								



1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja DPPKBPPPA, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2024.
2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2024, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DPPKBPPPA. Penyusunan Renja DPPKBPPPA berpedoman pada Renstra DPPKBPPPA tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Renja DPPKBPPPA tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja DPPKBPPPA tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DPPKBPPPA mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran PD;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan PD; dan
- e. Penutup.

3. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja DPPKBPPPA merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja DPPKBPPPA dan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja DPPKBPPPA dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/forum DPPKBPPPA. Kemudian rancangan renja DPPKBPPPA disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi RKPD. Penyusunan Rancangan Renja DPPKBPPPA dimulai proses penyusunannya pada minggu ke-4 Februari 2025. Kemudian, Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan renja DPPKBPPPA untuk menjamin rancangan Renja DPPKBPPPA sudah selaras dengan ranwal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

Forum PD/Lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum Perangkat Daerah/Lintas DPPKBPPPA dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPPKBPPPA. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang



telah disusun dalam rancangan Renja PD. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas PD.

Forum Perangkat Daerah Dinas PPKBPPPA dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 di Ruang Kepala Dinas dan di tempat masing-masing oleh peserta melalui *zoom meeting*, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Pagu Indikatif PD yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

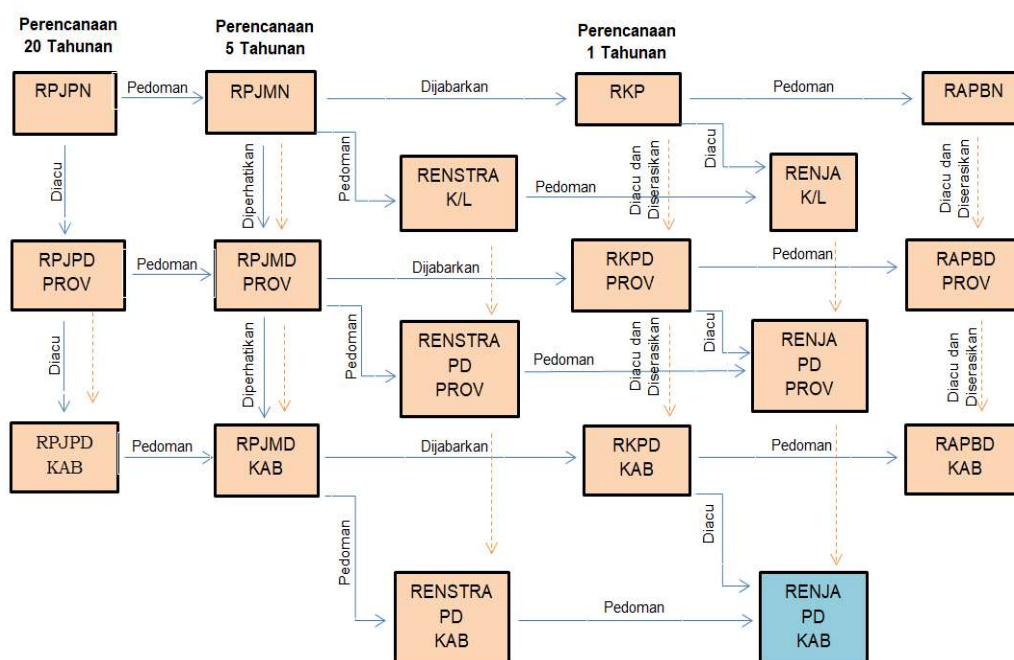
6. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja PD yang telah disampaikan kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda diverifikasi untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Perkada tentang RKPD dan renja PD lainnya. Apabila dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir renja PD kepada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut dan disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja DPPKBPPPA disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isi- isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 – 2029, Renstra DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 – 2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Renja DPPKBPPPA tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, Renstra DPPKBPPPA, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004



1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah);
3. Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);



20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKBPPPA (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 119);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 18).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renja DPPKBPPPA ini adalah :

1. Merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPPKBPPPA.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBPPPA untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja DPPKBPPPA ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf DPPKBPPPA dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPPKBPPPA.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPPKBPPPA pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DPPKBPPPA Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja DPPKBPPPA, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA Tahun Lalu
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra DPPKBPPPA, analisis kinerja pelayan DPPKBPPPA, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA dan sebagainya.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPPKBPPPA dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup
Berisi ketentuan penutup.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini dimuat revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBPPPA tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPKBPPPA tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPPKBPPPA tahun-tahun sebelumnya.

Revidi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBPPPA tahun 2024 dan realisasi Renstra DPPKBPPPA mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPPKBPPPA dan realisasi APBD untuk DPPKBPPPA. Dari hasil revidi yang dilakukan, maka diketahui hal – hal sebagai berikut :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPPKBPPPA. Disamping itu, juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan pencapaian Renstra DPPKBPPPA disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA
Tahun 2024 s/d Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : DPPKBPPPA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPPKBPPPA) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja DPPKBPPPA Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2025	
					Target Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Realisasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 08 02 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,00 %	95,05%	95,80%	95,05%	99,22%	95,85%	95,32%	99,29%
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	90,10 %	80,05%	80,75%	80,75%	100%	80,80%		
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang berarticipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	53%		64,0%			53%		
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75%		75%			75%		
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,0036		0,0029			0,0036		
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Persentase Korban Kekerasan yang	100%		100%	100%		100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPPKBPPPA) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja DPPKBPPA Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2025	
								Target Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Realisasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	mendapatkan pelayanan							
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%		100%	100%	100%		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	40%				40%		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan gender dan hak anak	0		50%		0		
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	0		0		0		
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	0		0		0		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Informasi Layak Anak	100%		100%		100%		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi	3 media		3 media	3 media	3 media		
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya				Nindya		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	80%		80%		80%		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	85%		85%		85%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPPKBPPPA) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja DPPKBPPPA Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2025	
					Target Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Realisasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%				100%		
2 08 07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,068%		0,067%		0,068%		
2 08 07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100%		100%	100%	100%		
2 08 07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%		100%	100%	100%		
2 14 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%
2 14 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%
2 14 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%
2 14 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%
2 14 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%
2 14 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	95%	95%	95%	100%	95%	100%
2 14 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPPKBPPPA) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja DPPKBPPPA Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2025	
					Target Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Realisasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25					1,25		
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%		100%	100%	100%	100%		
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	0		0	0		60%		
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,50%		74,30%			74,60%		
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	60%		62,30%			63%		
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%		37,71%			37,97%		
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,30%		26,7%			27,1%		
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	50%		55%			55%		
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2,24		2,22			2,20		
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	75%		77%			80%		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPPKBPPPA) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja DPPKBPPA Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2025	
					Target Renja DPPKABPPPA Tahun 2024	Realisasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
214042.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%		100%	100%	100%	100%		



Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di DPKBPPPA selama tahun anggaran 2024, antara lain:
 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Penunjang, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95,85%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 94,86%, sehingga tingkat realisasi kinerja sebesar 98,97%. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil dari program ini, karena dua kegiatan yang terdapat dalam program ini tidak tercapai target kinerja keluarannya, yaitu:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 68%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 65%.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota direncanakan target pencapaiannya sebesar 75%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 70%.
 2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), direncanakan target pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Utama realisasi pencapaian dengan kategori Pratama. Pada program ini, kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaian Persentase Kecamatan Layak Anak sebesar 90%, realisasi pencapaiannya sebesar 15,4%
 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), direncanakan target pencapaian persentase CPR 74,6%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 69,67%. Pada program ini, kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota direncanakan target pencapaian persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang sebesar 26,7%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 23,40%.
 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) direncanakan target pencapaian Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,20 realisasi pencapaiannya adalah sebesar 2,36. Pada program ini, kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga direncanakan target pencapaian persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina sebesar 80%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 75%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



- II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluarannya, antara lain:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 95%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 95%
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 95%.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 95%.
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 95%.
 2. Program Perlindungan Perempuan terdapat kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluarannya, antara lain:
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%.
 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdapat kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluarannya, antara lain:
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan HakAnak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 4. Program Perlindungan Khusus Anak terdapat kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluarannya, antara lain:
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%.
- III. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di DPPKBPPPA selama tahun anggaran 2024, antara lain:
 1. Program Pengendalian Penduduk, direncanakan target pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,1, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 0,93.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini berisikan capaian kinerja DPPKBPPPA berhubungan dengan dasar pembentukan Dinas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun



2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPPKBPPPA.

Pencapaian kinerja DPPKBPPPA disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	IKD	IKU PD	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	√		9,01%	9,4%	9,8%	30,76%	Tidak Tersedia	9,8%	Tidak Berlaku	
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	√		8,57%	14,28%	17,14%	5,71%	Tidak Tersedia	17,14%	Tidak Berlaku	
3.	Rasio KDRT	√		0,003	0,002	0,001	0,002	Tidak Tersedia	0,001	Tidak Berlaku	
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	√		99.750	100.000	102.000	94.267	Tidak Tersedia	102.000	Tidak Berlaku	
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A danPPT/PKT di Rumah Sakit	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	

7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
11.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	√		0,0029	0,0029	0,0029	0,0013	Tidak Tersedia	0,0029	Tidak Berlaku	
12.	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	√		6,1%	6,7%	7,3%	4,48%	Tidak Tersedia	7,3%	Tidak Berlaku	
14.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	√		1,1	0,95	0,95	0,93	Tidak Tersedia	0,95	Tidak Berlaku	
15.	Total Fertility Rate (TFR)	√		2,20	2,18	2,16	2,37	Tidak Tersedia	2,16	Tidak Berlaku	
16.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	√		60%	65%	70%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	70%	Tidak Berlaku	
17.	Ratio Akseptor KB	√		1 : 5	1 : 4	1 : 4	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	1 : 4	Tidak Berlaku	



18.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	√		73,5%	74,3%	74,6%	59,6%	Tidak Tersedia	74,6%	Tidak Berlaku	
19.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15 ² 19 tahun(ASFR 15-19)	√		23	23	22	15,1	Tidak Tersedia	22	Tidak Berlaku	
20.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	√		0,7%	0,6%	0,6%	0,4%	Tidak Tersedia	0,6%	Tidak Berlaku	
21.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	√		8,63%	8,25%	7,8%	15,88%	Tidak Tersedia	7,8%	Tidak Berlaku	
22.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	√		27,1%	27,5%	28,2%	32,78%	Tidak Tersedia	28,2%	Tidak Berlaku	
23.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	√		80%	83%	85%	82%	Tidak Tersedia	85%	Tidak Berlaku	
24.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	√		80%	83%	85%	84%	Tidak Tersedia	85%	Tidak Berlaku	
25.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	√		83%	84%	85%	84%	Tidak Tersedia	85%	Tidak Berlaku	
26.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	√		6	8	9	13	Tidak Tersedia	9	Tidak Berlaku	
27.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	√		78%	78%	79%	78%	Tidak Tersedia	79%	Tidak Berlaku	



28.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri	√		70%	70%	70%	66%	Tidak Tersedia	70%	Tidak Berlaku	
29.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	√		1 : 1,2	1 : 1	1 : 1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	1 : 1	Tidak Berlaku	
30.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
31.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
32.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	√		100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	100%	Tidak Berlaku	
33.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	√		65%	70%	70%	70%	Tidak Tersedia	70%	Tidak Berlaku	
34.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	√		65%	70%	70%	70%	Tidak Tersedia	70%	Tidak Berlaku	
35.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	√		74,6%	74,8%	75,0%	74,6%	Tidak Tersedia	75,0%	Tidak Berlaku	
36.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		√	95,90	95,95	96,00	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	96,00	Tidak Berlaku	
37.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		√	0,0029	0,0029	0,0029	0,0013	Tidak Tersedia	0,0029	Tidak Berlaku	



38.	Rasio kekerasan terhadap anak		√	0,0029	0,0029	0,0029	0,038	Tidak Tersedia	0,0029	Tidak Berlaku	
39.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		√	1,1	0,95	0,95	0,93	Tidak Tersedia	0,95	Tidak Berlaku	
40.	Nilai AKIP		√	69	70	70	71,19	Tidak Tersedia	70	Tidak Berlaku	
41.	Nilai IRB		√	17	17	18	70,81	Tidak Tersedia	18	Tidak Berlaku	
42.	Nilai IKM		√	85	85	85	84,05	Tidak Tersedia	85	Tidak Berlaku	
43.	Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)		√	Tidak Tersedia	60,9	62,3	59,5	Tidak Tersedia	62,3	63,6	
44.	Indeks Ketimpangan Gender		√	Tidak Tersedia	0,438	0,423	0,453	Tidak Tersedia	0,423	0,408	
45.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		√	Tidak Tersedia	94,87	94,88	94,86	Tidak Tersedia	94,88	94,9	
46.	Indeks Perlindungan Anak		√	Tidak Tersedia	64,6	64,7	69,30	Tidak Tersedia	64,7	64,7	
47.	Nilai SAKIP DP2KBP3A		√	Tidak Tersedia	74,03	74,15	74,03	Tidak Tersedia	74,15	74,30	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya peran masyarakat dalam pengembangan KB secara mandiri;
2. Masih kurangnya jumlah akseptor KB dan pendistribusian alat kontrasepsi gratis / murah kepada pasangan usia subur;
3. Masih kurangnya sosialisasi pengembangan program KB bagi keluarga miskin;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keluarga sejahtera
5. Masih lemahnya tingkat keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
6. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi kependudukan
- b. Masih adanya fenomena kesenjangan gender
- c. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a. Dukungan penuh dari pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- b. Sudah tersedianya regulasi di daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Dukungan penuh dari kader KB dan organisasi perempuan dalam mendukung program dan kegiatan
- d. Adanya dukungan penuh dari stakeholder terkait dalam penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPPKBPPPA dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Perangkat Daerah tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.



Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.



Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,00%	690.000.000	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,00%	680.000.000	
	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	90,10%	190.000.000	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah		130.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	43 laporan	90.000.000,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Dokumen	0	
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	43 Lembaga	100.000.000	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	43 Lembaga	130.000.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			380.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	71%	370.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	Kab. Lima	Jumlah organisasi kemasyarakatan/	30 Lembaga	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	Kab. Lima	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/	30 Lembaga	0	Menduk ung IKU



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Puluh Kota	profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Puluh Kota	dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			OPD
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 orang	90.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 orang	130.000.000	
	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	140.000.000	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	240.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	120.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	80%	180.000.000	
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan	30 Lembaga	120.000.000	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang	30 Lembaga	180.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota	perempuan yang mendapatkan pendampingan			pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota	mendapatkan pendampingan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100,0%	340.659.878	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	295.659.878	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Rasio KDRT	12 Dokumen	150.519.878	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Rasio KDRT	0.0029	150.519.878	
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	75.000.000	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.000.000	
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	25 Lembaga	75.519.878	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	25 Lembaga	145.519.878	Mendukung IKU OPD
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota		100,0%	80.140.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota		100%	80.140.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	4 orang	15.000.000	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	4 orang	15.000.000	
	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	1 kegiatan Orang	6.000.000	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	1 kegiatan Orang	6.000.000	
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	9.250.000	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	9.250.000	
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4 orang	24.620.000	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4 orang	24.620.000	
	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	10 orang	4.400.000	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	10 orang	4.400.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penjangkauan Tingkat Kabupaten/ Kota					Penjangkauan Tingkat Kabupaten/ Kota			
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	9.500.000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	9.500.000	
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	11.370.000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	11.370.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	110.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100 %	65.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	60.000.000	Mendukung IKU OPD
	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	12 Dokumen	50.000.000	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	12 Dokumen	5.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	100%	110.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	120.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			110.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	50%	120.000.000	
	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	50 Lembaga	110.000.000	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	50 Lembaga	120.000.000	Mendukung IKU OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Informasi Layak Anak	100%	100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Informasi Layak Anak	100%	100.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah media informasi		100.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah media informasi	3 buah	100.000.000	
	Penyediaan, Penyajian, dan	Kab.	Jumlah Dokumen Data	14 dokumen	50.000.000	Penyediaan, Penyajian, dan	Kab.	Jumlah Dokumen Data	14 Dokumen	95.000.000	Menduk



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Lima Puluh Kota	Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia			Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Lima Puluh Kota	Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia			ung IKU OPD
	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	14 Lembaga	50.000.000	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	14 Lembaga	5.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Lima Puluh Kota	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak		235.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Lima Puluh Kota	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Utama	280.000.000	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak		185.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	90%	270.000.000	
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga	135.000.000	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga	265.000.000	Menduk ung IKU OPD
	Pendampingan	Kab.	jumlah OPD kab/kota	12 Lembaga	50.000.000	Pendampingan	Kab.	jumlah OPD kab/kota	12 Lembaga	5.000.000	Menduk



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lima Puluh Kota	yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lima Puluh Kota	yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			ung IKU OPD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	100%	50.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	100%	10.000.000	
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	325 Orang	25.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	325 Orang	5.000.000	
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	14 Lembaga	25.000.000	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	14 Lembaga	5.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	725.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	725.000.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,067%	175.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,033 %	260.000.000	
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	8 Kegiatan	175.000.000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	8 Kegiatan	260.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	400.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	400.000.000	
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	0	70 orang	91.035.000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	0	70 orang	91.035.000	Menduk ung IKU OPD
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat	70 orang	71.575.000	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	70 orang	71.575.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota								
	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	90 Layanan Orang	18.675.000	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	90 Layanan Orang	18.675.000	
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiatan Orang	6.000.000	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiatan Orang	6.000.000	
	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	0	10 orang	51.580.000	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	0	10 orang	51.580.000	
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	70 orang Orang	116.135.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	70 orang	116.135.000	
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	30.000.000	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	30.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	15.000.000	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	15.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	150.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	65.000.000	
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	8 Dokumen	50.000.000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	8 Dokumen	5.000.000	
	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	25.000.000	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	5.000.000	
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi	8 Dokumen	25.000.000	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang	8 Dokumen	5.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota	Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang	50.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	5.426.858.850	PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95%	5.426.865.150	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95%	8.292.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%	8.292.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.292.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.292.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lima Puluh Kota	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lima Puluh Kota	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		4.790.768.850	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	4.790.775.150	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4.788.768.850	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4.788.775.150	
	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Laporan	2 laporan	2.000.000	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lima Puluh Kota	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lima Puluh Kota	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			91.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			91.800.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.759.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	93.241.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			151.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			151.200.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	35.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			204.798.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			204.798.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	183.090.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	183.090.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10.000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	11.708.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.708.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Lima Puluh Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		186.481.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Lima Puluh Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.2	186.481.000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah	Kab. Lima	Persentase kebijakan provinsi yang		45.862.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah	Kab. Lima	Persentase kebijakan provinsi yang	100%	45.862.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Puluh Kota	ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk			Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Puluh Kota	ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk			
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	13 Kegiatan	15.000.000	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	13 Kegiatan	15.000.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kegiatan	15.862.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kegiatan	15.862.000	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	13 Satuan Pendidikan	15.000.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	13 Satuan Pendidikan	15.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		140.619.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	70 %	140.619.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/ Kota	Kota				Kabupaten/Kota	Kota				
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	26 laporan	48.600.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	26 laporan	48.600.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156 dokumen	60.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156 dokumen	60.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	13 Laporan	32.019.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	13 Laporan	32.019.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)		3.399.554.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,8 %	3.398.554.000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB		1.502.800.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	64 %	1.502.800.000	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	13 Laporan	0	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	13 Laporan	0	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa	156 Laporan	917.800.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan	156 Laporan	917.800.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130 laporan	260.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130 laporan	260.000.000	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	125.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	125.000.000	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja	Kab. Lima	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan	40 organisasi	200.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja	Kab. Lima	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi	40 organisasi	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Puluh Kota	Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Puluh Kota	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan PKB yang didayagunakan		638.312.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	638.312.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	719 Orang	601.200.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	719 Orang	601.200.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	13 Laporan	37.112.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	13 Laporan	37.112.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Berencana (PKB/PLKB)								
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,7%	903.642.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26.7 %	903.642.000	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26 Fasyankes Laporan	53.400.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26 Fasyankes Laporan	53.400.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1743 Orang	699.242.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1743 Orang	699.242.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	121.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	121.000.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana	26 Laporan	30.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan	26 Laporan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota	dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota	Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	55%	354.800.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	55%	353.800.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	58 Kampung KB	324.800.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	58 Kampung KB	324.800.000	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	30.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	29.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Kab. Lima Puluh Kota	Total Fertility Rate (TFR)		1.868.607.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Kab. Lima Puluh Kota	Total Fertlity Rate (TFR)	2,18	1.869.600.700	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(KS)					(KS)					
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina		245.007.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	83%	246.000.700	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 Keluarga	30.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 Keluarga	30.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Laporan	85.007.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Laporan	85.000.700	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	13 Unit	130.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	25 unit	130.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Akseptor (UPPKA) yang tersedia					yang tersedia			
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	4345 Orang	1.000.000	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	4345 Orang	1.000.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota			1.623.600.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	1.623.600.000	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	130 laporan	738.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	130 laporan	738.000.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	130 laporan	885.600.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang	130 laporan	885.600.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					mendapat pendampingan			
	JUMLAH				13.082.160.728	JUMLAH				13.082.160.728	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, DPPKBPPPA berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya melalui masukan dari hasil pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPPKBPPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan DPPKBPPPA dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2026 ini akan menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat.



Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPPA	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi / dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hokum, sosial dan ekonomi	1 Paket	Pokok- pokok pikiran anggota DPRD
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota				
	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	DPPKBPPPA	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	1 Paket	Pokok – pokok pikiran anggota DPRD



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 dimana dirumuskan Visi Kementerian PPA sebagai berikut : “Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perempuan yang Berdaya dan anak yang terlindungi dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 “. Untuk mencapai Visi tersebut, Kemen PPA merumuskan Misi yang mencerminkan isi arah strategis dan mandate kelembagaannya sesuai dengan 8 (delapan) misi presiden dan wakil presiden yang disebut Asta Cita dimana yang terkait langsung dengan Kemen PPA adalah :

1. Asta Cita ke-1, memperkuat ideologi pancasila, demokrasi, dan pemajuan hak asasi manusia. Keterkaitan dengan Kemen PPA adalah untuk memastikan setiap kebijakan bersifat Humanis, Inklusif, Berperspektif Gender, serta Memprioritaskan upaya pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta memperkuat penegakan hukum atas perlindungan perempuan dan anak.
2. Asta Cita ke-4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Keterkaitan dengan Kemen PPA adalah untuk memastikan terpenuhinya Hak dan Kesempatan setiap Individu, khususnya perempuan dan anak, agar dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat dan inklusif, guna mendukung pembangunan manusia Indonesia yang berkeadilan dan berdaya saing.
3. Asta Cita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Keterkaitan dengan Kemen PPA adalah untuk memastikan perempuan berdaya dan anak terlindungi dari kerentanan ekonomi dan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut rumusan misi kemen PPA adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang komprehensif di berbagai bidang pembangunan.
2. Memperkuat kelembagaab Kemen PPA yang efektif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2025 – 2029, dalam rangka mendukung Visi Presiden RI 2025 – 2029 maka dukungan kemendukbangga/BKKBN terhadap Visi Presiden adalah “Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”

Untuk mendukung Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita maka formulasi misi Kemendukbangga/BKKBN adalah mendukung Misi Presiden melalui penyelenggaraan pembangunan kependudukan dan keluarga melalui :

1. Memperkuat sinergisitas kebijakan pengendalian kependudukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan ;
2. Menyenggarakan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup dalam meningkatkan kualitas keluarga ;
3. Menyenggarakan dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB dan KR) secara komprehensif ;
4. Memperkuat analisis kebijakan, sistem informasi dan data keluarga yang berkualitas dan terintegrasi serta meningkatkan inovasi teknologi informasi, komunikasi dan edukasi program bangga kencana ;
5. Meningkatkan jejaring kemitraan, peran serta masyarakat, tenaga lini lapangan dan kerja sama global ; dan
6. Meningkatkan kualitas kelembagaan, pengembangan kompetensi dan pengelolaan SDM aparatur, serta pengawasan dan pembinaan dilingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran PD adalah suatu tahapan yang penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah dari PD. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal – hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing – masing misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu – isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Perumusan



sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKBPPPA pada tahun 2025 – 2029 memiliki 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Indikator tujuan, 3 (tiga) Sasaran, dan 5 (lima) Indikator Sasaran sebagaimana di uraikan dibawah ini:

1. Tujuan utama DPPKBPPPA yaitu Meningkatkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif dengan indikator tujuannya yaitu Indeks Pembangunan Keluarga
2. Sasaran DPPKBPPPA yaitu :
 - a. Meningkatnya Keluarga Berkualitas dengan indikator sasaran :
 - i. Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)
 - b. Meningkatnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan indikator sasaran :
 - i. Indeks Ketimpangan Gender
 - ii. Indeks Pembangunan Gender
 - iii. Indeks Perlindungan Anak
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPPKBPPPA dengan indikator sasaran :
 - i. Nilai Sakip DPPKBPPPA

Berikut disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPPKBPPPA pada tahun 2025 – 2029 pada table 3.1 berikut ini :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan tahun DPPKBPPPA 2025 – 2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan DPPKBPPPA	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Daerah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	Meningkatkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)	60,9	62,3	63,6	64,8	66	67,1	BPS
		Sasaran I :	Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)	60,9	62,3	63,6	64,8	66	67,1	BPS
		Sasaran II :	Indikator I :							
			Indeks Ketimpangan Gender	0,438	0,423	0,408	0,393	0,378	0,363	BPS
			Indikator II :							
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,87	94,88	94,9	94,93	94,96	95,01	BPS
		Sasaran III :	Indikator III :							
			Indeks Perlindungan Anak	64,6	64,7	64,7	64,9	65	65,1	BPS
		Sasaran III :	Nilai SAKIP	74,03	74,15	74,30	74,50	74,65	75,00	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran RPJMD : Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DP2KBP3A	DP2KBP3A							Inspektorat
--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	-------------



3.3. Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPPKBPPPA untuk Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2026 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPPKBPPPA Tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan program/kegiatan pada Rencana Kerja DPPKBPPPA adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025 – 2029 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas DPPKBPPPA erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-1, yaitu “MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA ”

Ringkasan program dan kegiatan DPPKBPPPA pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan
Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
		1. Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	
			1. Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota.
		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
			3. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan

			di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			4. Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			5. Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
			6. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			7. &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&
			8. layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			9. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
			10. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			11. layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota
			12. Layanan Pengaduan atau



			Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			13. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			14. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			15. Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
		7. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			16. Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			17. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
			18. Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak



V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			19. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			20. Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		10 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			21. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			22. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		11 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			23. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
		12 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	



		Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			24. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			25. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			26. Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			27. Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			28. Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			29. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
			30. Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
			31. Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		13 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			32. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
			33. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
			34. Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			35. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah



			Kabupaten/Kotai
--	--	--	-----------------

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu DPPKBPPPA pada Tahun 2026 akan melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Program dan Kegiatan yang ada pada setiap PD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			13 Fasilitasi Kunjungan Tamu
			14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	



		Pemerintah Daerah	
			15 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			16 Pengadaan Mebel
			17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu DPPKBPPPA pada Tahun 2026 akan melaksanakan 1 Program, 6 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 3.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			1. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
			2. Pelaksanaan Rapat

			Pengendalian Program Bangsa Kencana
			3. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal.
		2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			4. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
			5. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
			6. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana
II.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		3. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
			8. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
			9. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
			10 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		4. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			11 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
			12 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,



			Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
		5. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
			13 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			14 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			15 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
			16 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		6. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			17 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
			18 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		7. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	



		Keluarga	
			19 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			20 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
			21 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
			22 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
		8. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			23 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)
			24 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu DPPKBPPPA pada Tahun 2026 akan melaksanakan 3 Program, 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program prioritas daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029. Program prioritas merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi kabupaten limapuluh kota.

Dalam kaitannya dengan kontribusi dalam program prioritas daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung



melaksanakan sub kegiatan yang termasuk kedalam beberapa program prioritas daerah.

Berikut ini ditampilkan daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

Tabel 3.5.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang memiliki standarisasi akses air bersih dan sanitasi yang baik dan ramah anak	Kegiatan : Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota Subkegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota Subkegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota Kegiatan : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota Subkegiatan : Penyusunan kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan kabupaten kota.	PPD1
2	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan	Optimalisasi Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN) dalam pencegahan dan penanganan	Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota Subkegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan	PPD 3



	perlindungan anak	kekerasan terhadap anak.	pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota	
3	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terwujudnya pencegahan dan penurunan stunting, pengobatan TBC dan UHC	Kegiatan : Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local Subkegiatan (1) : Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang. Subkegiatan (2) : Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokal Karya (Minilok) Kegiatan : Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : Peningkatan kesertaan penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Kegiatan : Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di kampung keluarga berkualitas Kegiatan : Pelaksanaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sub kegiatan (1) : Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin. calon PUS, ibu Hamil, pasca salin, kelahiran, baduta / balita) Sub Kegiatan (2) : Pendampingan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin. calon PUS, ibu Hamil, pasca salin, kelahiran, baduta / balita)	PPD 3



Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPPKBPPPA
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					13.082.160.728				15.283.175.250
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				13.082.160.728				15.283.175.250
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak				2.200.659.878				3.557.000.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		4,78%	680.000.000			5%	900.000.000
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Perempuan		69,3%				71,8%	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel /	100%	130.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		100%	300.000.000



	Kabupaten/Kota		Desa						
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Manajerial/ Jabatan Pimpinan tinggi pratama dan administrator) pada lembaga pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	29,94%	370.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		30%	450.000.000
		Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada legislatif		5,7%				5,7%	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	-	180.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		100%	150.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		85,5%	295.659.878			90%	541.000.000



2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga/ lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	25 organisasi	150.519.878	DAU, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		26 organisasi	275.000.000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	85%	80.140.000	DAU, DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		85,5%	91.000.000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi perempuan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	65.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		100%	175.000.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar		30%	120.000.000			40%	150.000.000
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan advokasi dan pendampingan untuk Peningkatan Kualitas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	1 lembaga	120.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		2 lembaga	150.000.000



	KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten							
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan		75%	100.000.000			75%	275.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data gender dan anak yang tersedia	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	2 dokumen	100.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		2 dokumen	275.000.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		60,6	280.000.000			60,9	600.000.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD/ Lembaga/ Organisasi yang memahami PHA	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	20 organisasi	270.000.000	DAU, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		20 organisasi	350.000.000
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel /	20 lembaga	10.000.000	DAU, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan		20 lembaga	250.000.000



	Kewenangan Kabupaten/Kota		Desa						
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		81,7%	725.000.000			81,8%	1.091.000.000
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		85,5%				90%	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga /lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	20 lembaga	260.000.000	DAU, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		20 lembaga	225.000.000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	85,5%	400.000.000	DAU, DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		90%	416.000.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	80%	65.000.000	DAU, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, DAK Non Fisik – Dana		80%	450.000.000



	Kabupaten/Kota					Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.881.500.850				11.726.175.250
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		100%	5.426.865.150			100%	5.651.768.850
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	8.292.000	DAU		100%	14.000.000
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	4.790.775.150	DAU		100%	4.792.768.850
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel /	100%	91.800.000	DAU		100%	117.800.000



			Desa						
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	180.000.000	DAU		100%	205.000.000
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	151.200.000	DAU		100%	157.200.000
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	204.798.000	DAU		95%	365.000.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19)		13,6	186.481.000			12,9	186.481.200
		TFR (Angka Kelahiran Total)		2,34				2,33	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian	Persentase kebijakan pemerintah daerah provinsi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten lima puluh kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	45.862.000	DAU, DAU yang ditentukan bidang pendidikan		100%	45.862.000



	Kuantitas Penduduk								
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk Sebagai Sasaran Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	56%	140.619.000	DAU, DAK Non Fisik – BOKB – KB		61%	140.619.200
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)		65.82%	3.398.554.000			68.4%	3.844.718.200
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		69,6%				75,9%	
		Persentase kebutuhan ber KB yang terpenuhi (met need)		82.5 %				83.4 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		12%				11%	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	1.502.800.000	DAK Non Fisik – BOKB – KB		100%	1.502.800.000



		Budaya Lokal							
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan untuk mendukung program bangga kencana	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	638.312.000	DAK Non Fisik – BOKB – KB		100%	638.312.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	28%	903.642.000	DAK Non Fisik – BOKB – KB , DAU yang ditentukan penggunaannya bidanng kesehatan, DAK Fisik – Bidang Keseharan Keluarga Berencana		28,5%	994.006.200
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	65%	353.800.000	DAK Non Fisik – BOKB – KB, DAU yang ditentukan penggunaannya bidanng kesehatan		70%	709.600.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Indeks Lansia Berdaya		62	1.869.600.700			62,8	2.043.207.000
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang		85,1				86,3	



	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	memiliki Remaja							
		Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		70%				75%	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	53%	246.000.700	Pendapatan Bagi Hasil, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan, DAK Non Fisik – BOKB - KB		58%	416.007.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten yang Berperan dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100%	1.623.600.000	DAK Non Fisik – BOKB – KB,		100%	1.627.200.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program dan kegiatan DPPKBPPPA untuk Rencana Kerja DPPKBPPPA tahun 2026 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal Renstra DPPKBPPPA tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPKBPPPA berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 di halaman berikut :



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						13.082.160.728,00							15.283.175.250,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.082.160.728,00							15.283.175.250,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.200.659.878,00							3.557.000.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	680.000.000,00						-	900.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	7 79.30	4.48 64.30	4.48 64.30	5 69.30	680.000.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000.000,00	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	130.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				43 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				43 Lembaga	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				30 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				50 orang	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				100 Orang	240.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				30 Lembaga	180.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	295.659.878,00						-	541.000.000,00	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	295.659.878,00	-	-	-	-	-	-	541.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.519.878,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pendidikan yang Berkualitas	-	-	275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pendidikan yang Berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				25 Lembaga	145.519.878,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	80.140.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	91.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				4 orang Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				1 kegiatan Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang orang	9.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				4 orang Orang	24.620.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang orang	4.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang orang	9.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang orang	11.370.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				200 orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	120.000.000,00						-	150.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak]	PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR	14	1	1	1	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan</i>				50 Lembaga	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	100.000.000,00						-	275.000.000,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN,EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	75	75	75	75	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	275.000.000,00	-
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				14 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				14 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	280.000.000,00						-	600.000.000,00	
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)	70.2	50.1	60.2	60.6	280.000.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	270.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Lembaga	265.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				325 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				14 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	725.000.000,00						-	1.091.000.000,00	
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eskploitasi , penelantaran, perkawinan dan perlakuan lainnya terhadap anak]	INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) PERSENTASE ANAK MEMRLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	70.2 82.2	100 82.9	100 81.6	100 81.7	725.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.091.000.000,00	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	260.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				8 Kegiatan	260.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	416.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			0				70 orang 0	91.035.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				70 orang Orang	71.575.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				90 Layanan Orang	18.675.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1 kegiatan Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			0				10 orang 0	51.580.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				70 orang Orang	116.135.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				8 orang Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.881.500.850,00							11.726.175.250,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.426.865.150,00						-	5.651.768.850,00	
		-	-	-	-	-	-	5.426.865.150,00	-	-	-	-	-	-	5.651.768.850,00	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.292.000,00			-	-	-	-	14.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.292.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.790.775.150,00			-	-	-	-	4.792.768.850,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.788.775.150,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.788.768.850,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.800.000,00			-	-	-	-	117.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	205.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	36.759.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	93.241.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.200.000,00			-	-	-	-	157.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.798.000,00			-	-	-	-	365.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	183.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.708.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	186.481.000,00						-	186.481.200,00	
		[Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk]	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19) TFR (Angka Kelahiran Total)	11.3 2.31	15.3 2.36	14.4 2.35	13.6 2.34	186.481.000,00	-	-	-	-	-	-	186.481.200,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	45.862.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	45.862.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
			<i>Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan</i>				13 Kegiatan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				13 Kegiatan	15.862.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.862.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				13 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	140.619.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	140.619.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				26 Laporan	48.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		48.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				156 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		60.000.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				13 Laporan	32.019.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		32.019.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	3.398.554.000,00						-	3.844.718.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)]	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang terpenuhi (met need) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	76.30 85.80 92.34	58.20 60.60 80.60	63.20 63.81 81.60	65.82 69.60 82.50	3.398.554.000,00	-	-	-	-	-	-	3.844.718.200,00	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.502.800.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataa n Layanan Kesehatan	-	-	1.502.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				13 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataa n Layanan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				156 Laporan	917.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		917.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				130 Laporan	260.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				12 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				40 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	638.312.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	638.312.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				719 Orang	601.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		601.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				13 Laporan	37.112.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		37.112.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	903.642.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-	-	994.006.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Fasyankes Laporan	53.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		58.740.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1743 Orang	699.242.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		769.166.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		133.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	353.800.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-	-	709.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				58 Kampung KB Kampung	324.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		649.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				12 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	1.869.600.700,00						-	2.043.207.000,00	
		[Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)]	Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65.1 89.5 90	60 60.2 82.2	61.1 65 83.7	62 70 85.1	1.869.600.700,00	-	-	-	-	-	-	2.043.207.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	246.000.700,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	416.007.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				60 Keluarga	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				13 Laporan	85.000.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		85.007.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				13 Unit	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>				4345 Orang	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	1.623.600.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	1.627.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				130 laporan	738.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		738.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				130 laporan	885.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		889.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	JUMLAH							13.082.160.728,00								15.283.175.250,00		

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,
Jumlah Program dan Kegiatan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2026

No	Bidang Urusan	2026			2027			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	14	860.544.600	5	14	996.471.100	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	14	9.750.089.540	4	14	10.162.821.348	



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2026. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempedomani hasil evaluasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

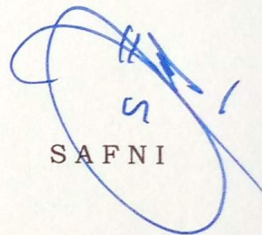
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 050/437/BUP-LK/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 050/45/BUP-LK/ XII /2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-
OFFICIO

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Anggota
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Pranata Humas	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	Anggota
	Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi	Anggota
	Fungsional Sanitarian	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang	Anggota
	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubbag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Penera	Anggota
	Fungsional Analisis Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ketua
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Fungsional Analis Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhortbun	Ketua
	Sekretaris Distanhortbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengawas Benih	Anggota
	Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Fungsional Umum	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/ Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Pangan	
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Arsiparis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Kepala Bappelitbangda	Ketua
	Sekretaris Bappelitbangda	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Program Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Keuangan Bappelitbangda	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi	Anggota
	Pelaksana pada Bappelitbangda	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umun dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketentruman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksanaan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO